

ABSTRAK

Yogi Maryudin, 2018. *Implementasi Keputusan Bupati Garut Nomor 511.3/Kep.80.Dp2esdm/2017 Tentang Penetapan Lokasi Sementara Bagi Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kecamatan Garut Kota.*

Penelitian ini berangkat dari masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak kunjung selesai di setiap daerah di Indonesia. Keberadaan PKL kerap dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan biasanya menimbulkan masalah seperti masalah kemacetan, kebersihan serta keindahan kota. Ini disebabkan karena PKL terkadang cenderung untuk berdagang di tempat yang tidak diizinkan untuk berdagang. Padahal kegiatan jual beli sudah difasilitasi dengan adanya kios atau lapak yang permanen sebagai penyewa pasar yang dilindungi oleh undang-undang. Namun karena biaya sewanya yang mahal, membuat para pedagang lebih memilih sarana umum yang murah bahkan gratis. Berkembangnya PKL dipicu oleh gagalnya pemerintah dalam pembangunan ekonomi, yang pada akhirnya menyebabkan meningkatnya pengangguran dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga pilihan satu satunya adalah mencari pekerjaan yang tidak memerlukan persyaratan yaitu dengan berjualan sebagai Pedagang Kaki Lima.

Landasan pemikiran dari penelitian ini yaitu mengkaji Implementasi Keputusan Bupati Garut Nomor 511.3/Kep.80.Dp2esdm/2017 Tentang Penetapan Lokasi Sementara Bagi Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kecamatan Garut Kota dalam teknis pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam penelitian ini lebih ditekankan pada reasisaasi kebijakan serta hubungan dengan penataan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dengan memuat enam variabel yaitu Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap atau Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana, Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, dan Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Penelitian ini menggunakan metode studi analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan spesifikasi penelitian *field research* (penelitian lapangan). Adapun metode pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Keputusan Bupati Garut Nomor 511.3/Kep.80.Dp2esdm/2017 Tentang Penetapan Lokasi Sementara Bagi Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Garut Kota yang dilakukan oleh agen pelaksana teknis yakni Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaannya belum maksimal dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Karena masih memiliki kekurangan dalam pemanfaatan sumber daya, lingkungan eksternal dan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan tersebut sehingga menghambat sasaran dan tujuan yang diinginkan.

Kata Kunci : *Implementasi, Kebijakan, Pedagang Kaki Lima*

ABSTRACT

Yogi Maryudin, 2018. *Implementation of the decisions of the Regent of Garut 511.3/Number Kep. 80. Dp2esdm/2017 About determination of temporary location For business activities of street vendors In Garut Districts of the city.*

This study derives from the problem of street vendors (Street Vendors) who failed to finish in every region in Indonesia. The presence of Street Vendors often considered illegal due to occupy the public space and usually cause problems such as the problem of congestion, the cleanliness and beauty of the city. Street Vendors sometimes tend to trade in places that are not allowed to trade. Whereas the activities of buying and selling has already facilitated by the government existence of a permanent shop or sellers as the market tenants are protected by law. Due to the cost of the rent is expensive, the traders prefer to choose a public facilities that cheap and even free. One of the impact of failure economic government, raised many unemployment-difficuly to a job. So, they choose to look for a job that don't need requitment such as street vendor.

Cornerstone research is thought of reviewing the implementation of the decisions of the Regent of Garut 511.3/Number Kep. 80. Dp2esdm/2017 About determination of temporary location For business activities of street vendors In the city of Garut Districts in the technical implementation. this study is more emphasized on realisation policy and the relationship with structuring and reform against street vendors. The author uses the theory of Van Meter and Van Horn with six variables is size and policy objectives, resources, Implementing Agent Characteristics, attitudes or Inclinations (Disposition) The Executor, communication between organizations and Implementing Activities, and economic, social, Environmental and political.

This research is a descriptive analysis of the study using the method of approach to qualitative research and specification of field research (fieldwork). The method of data collection is obtained by observation, interviews, and documentation study.

The results of this research show that the implementation of the decisions of the Regent of Garut 511.3/Number Kep. 80. Dp2esdm/2017 a bout determination of temporary location for business activities of street vendors in district of Garut City conducted by implementing technical agents in atetion, the implementation hasn been maximum yet the expectation. Those reasons are lack of resources. Because there is still a lack of resources, outside environmental and weak supervision against the execution so that inhibit the desired goals and objectives.

Keywords: *Implementation, Policy, Street Vendors*